

## Pengembangan Model Komunikasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan *Geopark* Pangandaran

Iriana Bakti<sup>1</sup>, Suwandi Sumartias<sup>2</sup>, Trie Damayanti<sup>3</sup>, dan Aat Ruchiat Nugraha<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Padjadjaran

### ABSTRAK

**Pangandaran** adalah salah satu destinasi wisata terkenal di Jawa Barat yang memiliki keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang terus dipelihara melalui mekanisme pendidikan lingkungan untuk menuju ke arah pelestarian dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal, pola interaksi antar pemangku kepentingan, dan saluran komunikasi yang mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran. Metode penelitiannya eksploratif untuk menginventarisir berbagai gejala yang berkaitan dengan pelaksanaan kearifan lokal, pola interaksi, dan saluran komunikasi dalam mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, dan studi kepustakaan. Informannya penggiat wisata yang terkait dengan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan kearifan lokal, seperti, *layang syeikh*, *babarit*, *hajat leuweung*, dan sebagainya telah dimanfaatkan untuk menambah daya tarik wisata di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Pola interaksi pada tataran birokrat masih belum jelas, karena rencana tersebut baru sebatas wacana atau *statement* politis, sedangkan pada tataran masyarakat (penggiat budaya dan pariwisata) sudah terbentuk melalui forum silaturahmi dengan sesepuh adat, dan diskusi kelompok penggiat budaya dan wisata, sehingga terbangun kesepahaman, kesepakatan, kerjasama, dan kolaborasi di antara mereka. Saluran komunikasi yang terbentuk bersifat *person to person* (antarpersona) antara penggiat budaya dan pariwisata dengan sesepuh adat. Saluran kelompok memiliki konformitas dan kohesivitas yang tinggi dalam mengembangkan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal di Pangandaran. Media sosial digunakan untuk mengirim dan menerima informasi, sehingga semakin menguatkan hubungan dan ikatan sosial di antara mereka.

**Kata-kata Kunci:** *Geopark*; kearifan lokal; komunikasi; model; pariwisata

### *Development of Local Tourism Based Tourism Communication Model in Geopark Pangandaran Area*

### ABSTRACT

**Pangandaran** is one of the most famous tourist destinations in West Java because in this region there are a variety of natural and ancient Sundanese cultural attractions. The tourist attraction in Pangandaran is a geological heritage that contains biodiversity and cultural diversity which is continually maintained through the mechanism of environmental education to go towards the preservation and sustainable development of the environment. This study aims to identify local wisdom, patterns of interaction between stakeholders, and communication channels that support the formation of Pangandaran *geopark*. Data collection techniques used interview guidelines, and library studies. The informants were parties related to the development of tourism based on local wisdom in Pangandaran Regency, both from relevant agencies, tourism agents, and cultural activists who were chosen purposively. Research results show that local wisdom, like, *layang Syeikh*, *babarit*, *hajat leuweung*, etc, has been used to increase tourist attraction in various regions in Pangandaran Regency. The pattern of interaction at the level of the bureaucrat is still unclear, because the plan is only limited to discourse or political statement, while at the community level (activists of culture and tourism) have been formed through forums with traditional elders, and discussions of cultural and tourism activists, so that understanding can be established. an agreement, cooperation and collaboration between them. Communication channels formed are person-to-person (interpersonal) between cultural and tourism activists with indigenous elders. Group channels have high conformity and cohesiveness in developing culture-based and local wisdom *geopark* tourist destinations in Pangandaran. Social media (cellphones) are used for, sending and receiving information, so that it further strengthens the relationships and social ties between them.

**Keywords:** *Communication; geopark; local wisdom; model; tourism*

---

**Korespondensi:** Dr. Iriana Bakti, M.Si. Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 45363. *Email:* iriana.bakti@unpad.ac.id

## PENDAHULUAN

Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang usianya masih sangat muda namun memiliki potensi alam yang sangat bagus sebagai destinasi wisata yang dapat menghasilkan pendapatan untuk pembangunan daerah. Destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran tidak hanya pantai, tetapi sejak beberapa tahun yang lalu bertambah dengan wisata alam seperti Green Canyon (Cukang Taneuh), Citumang, dan sebagainya yang keindahannya tidak kalah dari wisata pantai. Destinasi wisata yang berwawasan lingkungan alam ini menjadi daya tarik tersendiri, karena di dalamnya mencakup faktor konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Pariwisata berwawasan lingkungan (ekowisata) selain pantai menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran, karena masih asri, bersih, udaranya masih segar, dan alamnya cukup menantang terutama bagi mereka yang berjiwa petualang, sehingga kawasan ekowisata di Pangandaran ini akan dijadikan *geopark* sebagai respons atas menurunnya kualitas lingkungan wisata pantai yang selama ini menjadi andalan pariwisata Pangandaran.

Untuk mengembangkan *geopark* Pangandaran, selain masalah konservasi, keindahan alamnya, kearifan lokal yang bertebaran di wilayah tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk mengundang kedatangan wisatawan. Kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran menurut Witular merupakan “perilaku positif manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitar yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat setempat yang berkembang menjadi kebudayaan daerah tersebut” (Permana, 2010).

Kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran mencerminkan identitas/kepribadian setempat yang menyebabkan para anggotanya dapat mengaktualisasikan potensi diri untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, menurut Hadi, “berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*)” (Permana, 2010). Kearifan lokal ini menjadi objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam

rangka memenuhi keinginan wisatawan dalam berwisata secara spiritual, karena berdasarkan hasil penelitiannya, Maharani mengungkapkan bahwa pada dasarnya “motif pelancong budaya dan pelancong religi mencari ketenangan, kesenangan, ketertarikan pada sejarah, dan untuk berkumpul dengan keluarga” (Maharani, 2014).

Untuk mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata *geopark* yang memadukan unsur keindahan alam dan keragaman budaya (kearifan lokal), maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas terhadap sumber daya alam dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan kepada mereka, terutama yang berkaitan dengan pelatihan pengelolaan wisata alam, *tour guide*, dan pelatihan kewirausahaan agar mereka menjadi SDM yang handal untuk membantu pemerintah dalam mengelola kawasan yang dijadikan *geopark*, sehingga pada akhirnya mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, karena menurut Saayman, “pariwisata dianggap memiliki nilai ekonomi dalam pengembangan properti yang menghasilkan pendapatan yang cukup besar dan kemampuannya dalam menyediakan pekerjaan” (Wibawanto, 2015).

Pengembangan pariwisata *geopark* Pangandaran berbasis kearifan lokal ini menjadi merupakan kreativitas masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri, dan dapat menunjang pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa, “Ekonomi kreatif bukan hanya diukur dari segi ekonomi tetapi juga dapat diukur dari segi dimensi budaya. Dewasa ini, ide-ide kreatif yang muncul pada dasarnya bersumber dari kearifan lokal daerah. Hal ini memberikan makna bahwa kearifan lokal sangat menentukan arah perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia” (Rakib, 2017).

Untuk itu diperlukan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, baik dari instansi terkait, pelaku wisata, penggiat budaya dan pariwisata, komunitas lokal, dan sebagainya untuk bekerjasama membangun kawasan *geopark* Pangandaran berdasarkan modal sosial yang tersedia seperti jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendukung koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama.

Koordinasi dan kooperasi dari berbagai pemangku kepentingan akan semakin mempermudah terwujudnya Pangandaran sebagai sebuah kawasan *geopark* yang harus diketahui oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk itu diperlukan upaya *place branding* untuk memperoleh reputasi yang baik dan mendapatkan *brand equity* dalam pengelolaan kawasan *geopark*, dan berbasis pada strategi dan teknik yang sesuai dengan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya sebagai identitas Pangandaran.

Untuk melakukan *place branding* Pangandaran sebagai kawasan *geopark* diperlukan upaya untuk mengkomunikasikan kawasan tersebut yang didasarkan pada keunikan wilayahnya, baik berupa kondisi fisik (geologis), maupun kearifan lokal yang ada dan dilakukan oleh masyarakat Pangandaran. Komunikasi merupakan proses penyamaan makna bersama di antara para pesertanya, yang dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan yang mendukung pengembangan wisata *geopark* di Kabupaten Pangandaran.

Aktivitas komunikasi dalam mewujudkan pariwisata *geopark* di Pangandaran ini dapat menggambarkan sebuah model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Nugraha et al. 2017), yang menyatakan:

Model komunikasi pariwisata yang berbasiskan kearifan lokal merupakan bagian dari praktik komunikasi yang secara praktis dapat memberikan nuansa pembaharuan kegiatan wisata selama ini yang berorientasi pada model “modern” yang berbasiskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Model yang berbasiskan kearifan lokal, dilakukan dalam upaya untuk memberikan alternatif pemilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh para wisatawan.

Untuk mengembangkan model komunikasi pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Pangandaran, berupa gambaran tentang aktivitas-aktivitas tradisi/budaya lokal yang masih dilaksanakan di wilayah tersebut, diperlukan pula gambaran tentang pola interaksi yang berlangsung di antara pemangku kepentingan, dan saluran komunikasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Pola interaksi dalam mengembangkan

destinasi pariwisata *geopark* tersebut merupakan fenomena yang menggambarkan interaksi di antara para pemangku kepentingan, baik secara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang satu sama lain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mengembangkan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Pangandaran.

Pola interaksi antar individu terjadi ketika seorang penggiat budaya bersilaturahmi dengan ketua adat untuk membicarakan ritual adat yang bisa diangkat untuk dijadikan objek wisata, setelah itu penggiat budaya tersebut membicarakan hasil pertemuannya dengan ketua adat kepada komunitas penggiat budaya lainnya, selanjutnya komunitas penggiat budaya berdiskusi dengan kelompok penggerak wisata tentang pengangkatan aktivitas budaya (kearifan lokal) yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata *geopark* di Pangandaran.

Interaksi yang terjadi di antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Pangandaran yang terjadi seperti pertemuan silaturahmi, pertemuan bersama, dan sebagainya menggambarkan pula aktivitas komunikasi di antara mereka. Untuk itu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, kearifan lokal yang mendukung terbentuknya kawasan wisata *geopark* Pangandaran, pola interaksi di antara pemangku kepentingan, dan saluran komunikasi yang digunakan dalam mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata *geopark* berbasis kearifan lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif. Metode eksploratif “bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu” (Arikunto, 2005), di mana dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menginventarisir berbagai gejala yang berkaitan dengan pelaksanaan kearifan lokal yang masih dilakukan oleh masyarakat Pangandaran yang mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran, pola interaksi yang terjadi di antara para pemangku kepentingan di Pangandaran, dan menginventarisir saluran komunikasi yang digunakan yang mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh gambaran umum bahwa Kabupaten Pangandaran banyak memiliki wilayah dan budaya yang dapat dijadikan destinasi wisata *geopark*. Hal ini dimungkinkan, karena Pangandaran merupakan suatu kawasan yang memiliki karakteristik geologi, budaya, sejarah, serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang turut menjaga dan melestarikan. Dengan kata lain, masyarakat di Kabupaten Pangandaran sudah mengembangkan budaya-budaya lokal untuk mendukung pengembangan kawasan wisata *geopark* di Pangandaran.

Beberapa budaya lokal yang masih dilaksanakan menurut penggiat budaya di Pangandaran di antaranya adalah *Hajat Laut*, *Hajat Leuweung*, *Babad Cijulang*, *Uga Lokal* (pernyataan sebagai rencana atau agenda), *cacagan* (peribahasa) yang dibacakan di Nusawiru pada bulan Mulud dan Muharam serta dihadiri oleh semua sesepuh komunitas adat di Pangandaran seperti Aki Ajim, Tradisi Layang Syekh, Babarit, dan sebagainya.

Rencana pengembangan destinasi wisata *Geopark* di Kabupaten Pangandaran menurut penggiat budaya di Kabupaten Pangandaran Erik Krisna Yudha, “Sudah ada penelitian di Green Canyon yang bekerjasama antara dinas pariwisata Kabupaten Pangandaran dan Unpad, namun tindak lanjutnya sampai saat ini belum ada”. Hal senada dinyatakan pula oleh penggiat budaya lainnya bahwa rencana Pangandaran sebagai kawasan wisata *geopark* sudah lama, tapi belum ada wujudnya.

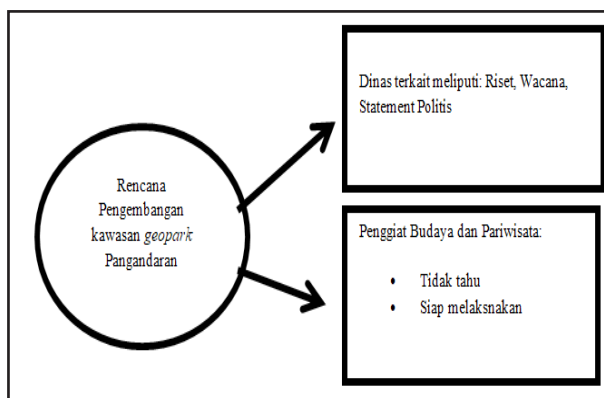
Sementara itu, Kepala Bidang Budaya Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran menyatakan bahwa “rencana pengembangan wisata *geopark* di Kabupaten Pangandaran masih sekedar *statement* politik bahwa Pangandaran merupakan kawasan *geopark* kaya Ciletuh”. Pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran menyatakan ada pembangunan semacam *Sea World*, ada kawasan Mangrove, Cagar Alam (Batu Kalde), dan ada penelitian kemaritiman.

Berkaitan dengan budaya di Pangandaran, kedua pejabat tersebut menyatakan hal yang relatif sama, bahwa pihak pemerintah telah menginventarisasi aktivitas budaya di Kabupaten Pangandaran untuk dijadikan daya

tarik wisata selain wisata pantai, dan pemerintah mendukung kelompok-kelompok penggiat budaya dan pariwisata untuk menjadikan budaya khas Pangandaran jadi pendukung destinasi wisata.

Berkaitan dengan aktivitas budaya di Pangandaran tersebut, salah satu tokoh adat menyatakan bahwa sesungguhnya mereka belum tahu tentang *geopark*, namun diakui bahwa di banyak kegiatan budaya lokal yang salah satunya yang diselenggarakan di bulan muharam sebagai bentuk silaturahmi dan rasa syukur kepada yang memiliki Kuasa atas keselamatan yang diberikan-Nya. Sementara itu tokoh formal (kepala Desa) Cikalong menyatakan budaya babarit berupa ritual tahunan di bulan Hapit ini rutin dilaksanakan untuk tolak bala dan rasa syukur masyarakat, dan masyarakat berpartisipasi setiap ada ritual tersebut. Pendapat Kepala desa tersebut sesuai dengan pernyataan seorang warga yang menyebutkan bahwa “saya belum pernah mendengar istilah *geopark*, namun saya selalu ikut kegiatan selamatannya setiap tahun dan harus disyukuri. Bahkan warga lainnya menyatakan tidak tahu mengenai apa itu *geopark*?, saya selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan budayanya seperti ritual babarit, sebab kalau tidak ikut ritual tersebut saya malu dengan tetangga”.

Pola interaksi antar pemangku kepentingan yang mendukung terbentuknya *geopark*



Sumber: Data Penelitian, 2018

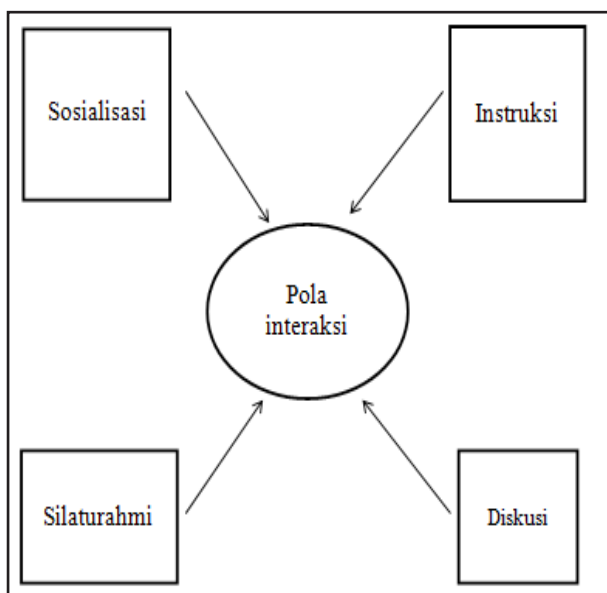
**Gambar 1** Budaya lokal dan rencana pengembangan kawasan wisata *geopark* Pangandaran

Pangandaran berbeda di antara pemangku kepentingan dari kalangan dinas/instansi terkait dengan pemangku kepentingan dari kalangan komunitas adat, dan penggiat budaya. Menurut



Kepala Bidang Budaya Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa Dinas pernah menerima informasi tentang wacana pengembangan kawasan wisata Pangandaran menjadi *geopark* pada saat rapat pimpinan dengan Bupati, namun sampai saat ini belum ada *follow up nya*”, sementara Sekretaris Dinas Pariwisata menyatakan bahwa sebagai aparatur sipil negara, pihak Dinas masih menunggu instruksi dari pimpinan sehingga kami belum melakukan aksi yang berkaitan dengan *geopark* Pangandaran. Namun demikian, kedua pejabat dari instansi terkait tersebut menyatakan hal senada, selaku aparatur pemerintahan akan saling mendukung sesuai dengan tupoksinya, karena belum ada *leading sector* mengenai konsep pengembangan *geopark* Pangandaran, maka sekarang setiap dinas-dinas berjalan sendiri-sendiri mengenai pelaksanaan rencana pengembangan *geopark* Pangandaran.

Sementara itu, pola interaksi di antara pemangku kepentingan dari komunitas adat dan penggiat budaya di Pangandaran menurut salah seorang penggiat budaya dilakukan dengan cara bertemu untuk silaturahmi dengan sesama penggiat budaya lain, dan juga dengan komunitas adat, bahkan banyak belajar dari mereka tentang kehidupan ini. Hal ini dilakukan



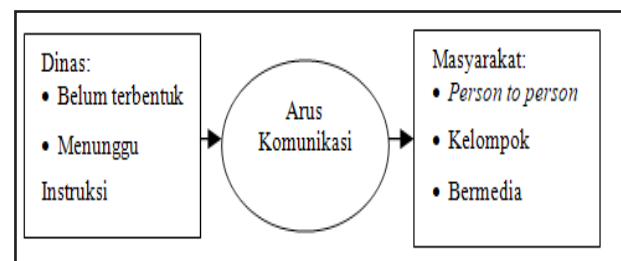
Sumber: Data Penelitian, 2018

**Gambar 2 Pola interaksi dalam rencana pengembangan kawasan wisata *geopark* Pangandaran**

dalam rangka berdiskusi untuk membicarakan masalah pariwisata di daerah masing-masing, bahkan membuka tempat wisata baru yang ada tradisi buhunnya.

Saluran komunikasi yang mendukung terbentuknya kawasan *geopark* Pangandaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kabid Budaya Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran menyebutkan bahwa saluran komunikasi yang digunakan oleh dinas terkait dalam mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran secara resmi belum ada, karena sejak diwacanakan oleh bupati sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Hal senada dinyatakan pula oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, “Kami menunggu instruksi selanjutnya tentang rencana pengembangan kawasan *geopark* di Pangandaran, sampai saat ini belum ada komunikasi”.

Saluran komunikasi di kalangan penggiat budaya dan pariwisata menurut penggiat wisata yaitu pola komunikasi yang terjalin masih bersifat *person to person* belum terlembagakan, pertemuan kelompok, dan mengunggah foto-foto pariwisata di Facebook dan Instagram. Selanjutnya, kami juga sering menghadiri ritual adat di setiap kecamatan di wilayah Pangandaran ini. Hal yang sama dinyatakan oleh penggiat wisata lainnya yang menyampaikan bahwa kami sering berkomunikasi dengan dinas pariwisata, berbicara dengan tokoh masyarakat



Sumber: Data Penelitian, 2018

**Gambar 3 Arus komunikasi dalam mendukung pengembangan kawasan *geopark* Pangandaran**

dan adat, berdiskusi dengan kelompok penggiat budaya dan pariwisata. Selain itu, dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, kami juga memanfaatkan WhatsApp dan Facebook untuk menyampaikan informasi mengenai potensi pariwisata Pangandaran agar menjadi destinasi baru.

Pembahasan penelitian: kearifan lokal yang mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran. Kabupaten Pangandaran selain memiliki destinasi wisata pantai, juga memiliki destinasi wisata alam lain, yaitu perbukitan, goa, sungai, dan aktivitas budaya yang sangat

potensi untuk dikembangkan. Khusus potensi budaya, di Kabupaten Pangandaran banyak aktivitas budaya sebagai kearifan lokal yang rutin dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Kearifan lokal tersebut bisa mendukung rencana pengembangan destinasi wisata *geopark* di Pangandaran. Apalagi bila ditunjang dengan tempat yang strategis, konsep wisata yang menarik, dan keramahan masyarakatnya, menjadi bahan pertimbangan wisata alam mengambil keputusan untuk mengunjunginya (Yusuf, 2014).

Namun demikian, rencana pengembangan kawasan *geopark* tersebut masih belum terwujud secara formal, walaupun sudah dilakukan riset sebelumnya tentang kondisi alam, dan budaya di wilayah Pangandaran, yang hasilnya Kabupaten Pangandaran memiliki potensi untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis *geopark*. Riset ini sangat penting sebelum suatu program ditetapkan “untuk merencanakan dan mengevaluasi suatu tindakan dibutuhkan informasi awal yang bersumber dari hasil riset” (Lattimore et al., 2010).

Riset yang dilakukan oleh tim dari Unpad ini telah mendapatkan informasi tentang potensi alam dan budaya, dan potensi penunjang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya, kemudian digabungkan, disusun, dianalisis, disimpulkan, dan direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran, bahwa potensi alam, budaya, sosial, ekonomi dapat dijadikan modal untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis *geopark* di Kabupaten Pangandaran. Rekomendasi tersebut sesuai dengan (Sutarso, 2012):

Kecenderungan bidang pariwisata masa depan bersumber dari potensi budaya dan kearifan lokal, sehingga gagasan tentang pola pengembangan wisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata yang lebih estetis (*edipeni*) dan etis (*adiluhung*) perlu didukung.

Walaupun rekomendasi dari hasil riset sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, dan telah juga disosialisasikan kepada jajarannya (instansi terkait), namun sampai saat ini rekomendasi tersebut belum dijadikan keputusan resmi pemda untuk mengimplementasikan program pengembangan destinasi wisata *geopark* di Pangandaran, bahkan masih wacana, dan

statement politis saja. Pejabat dari dinas terkait sampai saat ini masih menunggu instruksi dari atasannya, dan mereka siap melaksanakan instruksi tersebut sesuai dengan tupoksinya.

Wacana pengembangan destinasi wisata *geopark* di Pangandaran ini belum memberi kepastian bagi pejabat dari dinas terkait, kapan dan bagaimana hal tersebut bisa diimplementasikan menjadi kebijakan yang harus mereka pahami dan laksanakan. Mengonstruksi pemahaman (makna) *geopark* sebagai destinasi wisata di Pangandaran tidak sederhana, karena menurut Sparingga, “wacana harus dilihat sebagai sebuah konstruksi dari keseluruhan entitas dan hubungan sosial, bukan merupakan representasi atau perwakilan dari semua itu” (Basrowi & Sukidin, 2002). Jadi wacana tentang *geopark* di Pangandaran menjadi sangat kompleks, tidak hanya menyangkut lokasi atau objeknya saja, melainkan berkaitan pula dengan pengelolaannya, infrastrukturnya, permodalan, dan sebagainya.

Rencana pengembangan destinasi wisata *geopark* di Pangandaran yang menurut pejabat dari dinas terkait masih wacana dan statement politis tersebut, menyebabkan dinas terkait belum bisa bergerak, karena mereka masih menunggu instruksi. Sementara itu, para penggiat budaya dan pariwisata mempunyai inisiatif sendiri untuk mengembangkan objek wisata di wilayahnya masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal yang masih dilaksanakan secara turun-temurun, atau mengangkat kembali aktivitas-aktivitas budaya dahulu yang sudah jarang, bahkan tidak pernah dilaksanakan.

Pada umumnya para penggiat budaya dan pariwisata belum tahu rencana pengembangan destinasi wisata *geopark* di Pangandaran, namun mereka siap mendukung, bahkan ketua adat dan penggiat budaya dan pariwisata telah melaksanakan aktivitas budaya/kearifan lokal secara rutin yang notabene, faktor budaya/kearifan lokal tersebut merupakan salah satu syarat pengembangan kawasan *geopark*.

Upaya yang dilakukan para penggiat budaya dan pariwisata merupakan langkah proaktif mereka dalam mendiversifikasi dan mempromosikan objek wisata selain pantai kepada khalayak. Bagi mereka, budaya (kearifan lokal) harus dimunculkan sebagai respons terhadap dinamika lingkungan yang selalu berubah, baik berupa perubahan positif,

maupun perubahan negatif.

Perubahan positif berupa pengaktifan kembali tradisi lokal yang sudah ditinggalkan oleh sebagai masyarakat yang oleh penggiat budaya dan pariwisata diangkat kembali dan dijadikan sebagai objek wisata yang terintegrasi dengan alam sekitarnya, sehingga pengunjung (wisatawan) selain dapat melihat dan menikmati keindahan alam, juga menikmati suguhan budaya, seperti *hajjat leuweung*, *babarrit*, *ronggeng gunung*, dan sebagainya. Dengan demikian, keragaman budaya di lokasi yang akan dijadikan destinasi wisata *geopark* di Pangandaran dapat memberikan nilai tambah bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut.

Dengan demikian, dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, kearifan lokal yang merupakan manifestasi dari budaya lokal memiliki nilai strategis dan menjadi sumber inspirasi daerah. Oleh karena itu, kearifan lokal harus dipelihara dan dilestarikan, yang di antaranya melalui *expose* dalam berbagai *event* tertentu, atau dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tradisi lokal. Dengan demikian “dalam pengembangan kegiatan pariwisata, nilai budaya dan spirit lokal harus diperhatikan” (Nawangsih, 2017).

Aktivitas budaya yang rutin dilaksanakan antara lain adalah Layang Syeikh dan babarrit. Layang Syeikh yang dalam termonologi islam sama dengan manaqib Syekh Abdul Qodir Jaelani, yang dalam pelaksanaannya terdapat perpaduan antara budaya berupa pembacaan naskah kuno, mantra, dan perlengkapan ritual, dan agama berupa pembacaan doa dan tawasulan, yang dilakukan oleh secara bersama-sama, dalam rangka membangun perasaan dan pengertian bersama yang memungkinkan pesertanya bertransendensi dari segi waktu, tempat, dan bahkan diri mereka sendiri.

Demikian halnya dengan ritual Babarrit yang merupakan proses pengabaran sarat yang irit berupa makanan, minuman, serta buah-buahan, upaya untuk tolak bala (bencana), rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan kesejahteraan, silaturahmi masyarakat dengan makan bersama di perempatan, dan doa bersama.

Kedudukan tokoh-tokoh (adat, budaya dan agama) yang terlibat dalam ritual tersebut menjadi perekat dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial di wilayah

tersebut. Sebagai sebuah proses komunikasi ritual, dalam ritual *Layang Syeikh* dan *Babarrit*, tidak terbentuk pola pengiriman dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain, tapi lebih kepada pembacaan mantra dan doa tertentu yang diresapi oleh para pesertanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Carey (Astuti, 2016) menyatakan:

Komunikasi ritual bukan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, melainkan: “*communication is linked to terms such as “sharing,” “participation,” “association,” “fellowship,” and “the possession of a common faith.*” Jadi komunikasinya lebih kepada fungsi komunikasi itu sendiri, yaitu untuk saling berbagi, membangun partisipasi, membangun perkumpulan, membangun persahabatan, dan mempertegas sebuah keyakinan yang dimiliki bersama.

Rothenbuhler dan Coman menekankan bahwa:

Pada dasarnya Komunikasi ritual merupakan salah satu bentuk dan model dari komunikasi sosial (*social communication*), di mana proses komunikasi yang terjadi di dalamnya lebih mengetengahkan saling berbagai (*sharing*) tentang kebersamaan dalam budaya (*common culture*), bukan semata-mata berfokus pada pemindahan (*transfer*) informasi. Oleh karena itu dalam komunikasi ritual, proses pemindahan pesan bukan sesuatu yang ditekankan (Andung, 2010).

Pengusungan ritual budaya (kearifan lokal) seperti babarrit, layang syeikh, dan sebagainya menjadi satu paket perjalanan wisata dapat meningkatkan jumlah pengunjung (wisatawan) ke Kabupaten Pangandaran, karena wisatawan akan mengetahui dan merasakan pengalaman perjalanan dan keunikan seperti apa yang akan dinikmati selama perjalanan berdasarkan paket-paket wisata yang disediakan (Priyanto & Safitri, 2016).

Dengan demikian, kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata *geopark* di Kabupaten Pangandaran, karena keaslian dan keunikannya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke lokasi di mana

kearifan lokal tersebut ditampilkan. Pengunjung dapat berinteraksi dengan pelaku ritual karena kebersamaan, dan kesalingan berbagi menjadi spirit bagi praktik kearifan lokal tersebut.

Pola interaksi yang terjadi antar pemangku kepentingan yang mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran. Upaya pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran melibatkan berbagai elemen yang menjadi pemangku kepentingan bagi pengembangan wisata di wilayah tersebut. Para pemangku kepentingan tersebut ketika melakukan aktivitas pengembangan pariwisata berinteraksi satu sama lain, di mana dalam interaksi, terjadi kontak dan komunikasi yang mengarah kepada kerja sama di antara mereka. Menurut Soekanto, “interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial dan merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok dan antara individu dan kelompok” (Soekanto, 2005).

Interaksi yang terjadi di antara pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran ternyata polanya berbeda. Pola interaksi di antara dinas terkait cenderung statis dan satu arah, diawali dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Bupati dalam rapat pimpinan pemerintah Kabupaten Pangandaran, namun masih bersifat informatif. Jadi dalam hal ini Bupati hanya menyampaikan informasi tentang rencana pengembangan destinasi wisata berdasarkan riset yang dilakukan Unpad, informasinya masih umum, belum kepada hal-hal teknis, dan sebagainya.

Pesan yang bersifat informatif ini menurut Cassandra adalah:

Proses penyampaian informasi bersifat difusi atau penyebarluasan di mana pesan yang disampaikannya lebih simpel, jelas, dan tidak banyak menggunakan istilah (jargon) yang tidak populer di kalangan khalayak, karena tujuannya banyak untuk meningkatkan wawasan dan membangun kesadaran khalayak (Cangara, 2004).

Pola interaksi di antara pemangku kepentingan dari komunitas adat di Pangandaran relatif lebih mapan, karena di antara mereka, baik secara individu maupun kelompok telah terjalin interaksi sejak lama dan masih bertahan sampai saat ini sesuai dengan status

dan peranannya sebagai ketua adat/komunitas, terutama pada saat melaksanakan berbagai ritual. Di antara mereka telah terjalin kerjasama dalam mempertahankan tradisi buhun dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai ikat kepala, melaksanakan ritual mingguan, dan tahunan.

Selain itu, pola interaksi yang terjadi pada penggiat budaya dan pariwisata lebih dinamis dan dua arah yang berlangsung dalam kegiatan silaturahmi dan dialog antara penggiat budaya dan pariwisata dengan ketua adat, serta silaturahmi di antara penggiat budaya dan pariwisata itu sendiri. Menurut Gillin dan Gillin, “terjalannya hubungan-hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara orang-orang perorangan, hubungan antara kelompok-kelompok manusia, maupun hubungan antara orang perorangan dengan kelompok manusia bisa terwujud dengan interaksi sosial” (Soekanto, 2005).

Pola interaksi yang dinamis dan positif di antara penggiat budaya dan pariwisata dengan ketua dari komunitas adat atau sesama penggiat sudah berlangsung cukup lama dan secara rutin dilakukan, karena mereka menyadari bahwa budaya atau kearifan lokal di wilayah Kabupaten Pangandaran sangat lengkap dan perlu dilestarikan dan diperkenalkan ke dunia luar sebagai pelengkap, bahkan yang utama dalam mengembangkan destinasi wisata di wilayah masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmawati et al. bahwa “interaksi yang sifatnya positif menjadi modal dasar dalam membangun jaringan sosial, sehingga dapat mendukung keberhasilan pengembangan wisata alam” (Rachmawati et al., 2011).

Untuk mewujudkan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya atau kearifan lokal tersebut, mereka kemudian bersilaturahmi kepada para sesepuh/Ketua adat di setiap wilayah. Silaturahmi ini dilakukan untuk menyambung sesuatu (makna) ritual adat yang selama ini terlupakan bahkan hilang menjadi sesuatu yang kembali utuh, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi para penggiat budaya dan pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis kearifan lokal di Pangandaran.

Silaturahmi kepada sesepuh adat bagi penggiat budaya dan pariwisata sangat penting, karena sesepuh merupakan sumber utama yang dapat memberi informasi tentang sejarah, isi, tujuan, dan manfaat ritual budaya bagi



kelangsungan hidup manusia dan alam (Idum et al., 2017):

Kepala adat merupakan pemimpin informal yang memimpin masyarakat adat, dan menjadi panutan masyarakat adat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan, karena dapat menjadi kunci keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan acara adat tahunan. Oleh karena itu, peran kepala adat menjadi sangat penting.

Selain dengan sesepuh adat, penggiat budaya dan pariwisata juga berdiskusi di antara mereka untuk membahas potensi wisata di wilayah masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai daya tariknya. Dalam diskusi tersebut terjadi proses pertukaran gagasan, berbagi informasi yang berlangsung secara dialogis dan informal tanpa sekat di antara mereka, sehingga di antara mereka terjalin persaudaraan dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Timbulnya kerja sama didasarkan kepada kesadaran yang dimiliki mereka bahwa dirinya memiliki berbagai kepentingan yang sama sehingga memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut (Soekanto, 2005).

Terjalannya kerja sama di antara penggiat budaya dan pariwisata merupakan hasil dari proses pengakomodasian berbagai kepentingan di antara mereka, karena setiap penggiat budaya dan pariwisata mewakili daerah masing-masing yang notabene mempunyai jenis aktivitas budaya yang berbeda. Ada yang di daerahnya aktivitas budayanya masih berlangsung secara turun-temurun seperti *Layang Syekh* dan *babarit*, ada juga aktivitas budaya yang dicoba diaktifkan kembali untuk kepentingan daya tarik wisata di wilayahnya, seperti *hajat leuweung* di desa Selasari yang disertai dengan festival *kolecer*. Proses pengakomodasian berbagai kepentingan di antara penggiat budaya dan pariwisata ini sesuai dengan pendapat, yaitu “untuk membangun kesepahaman bersama di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham, sehingga pertentangan dapat dikurangi” (Soekanto, 2005).

Berdasarkan silaturahmi dan diskusi, serta dialog di antara sesepuh adat, dengan penggiat

budaya dan pariwisata, dan di antara para penggiat budaya dan pariwisata sendiri tercapai kesepakatan bersama untuk berkolaborasi dalam mewujudkan destinasi wisata berbasis budaya/kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.

Menurut Devine et al., “dilihat dari sektor publik, pada saat kolaborasi menjadi bagian yang sangat penting, karena melalui kolaborasi para pemangku kepentingan masing-masing dapat duduk bersama dalam satu wadah, membangun kesepahaman dan komitmen bersama, serta merasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan pariwisata” (Fairuza, 2017).

Namun demikian, kolaborasi yang terbentuk dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Pangandaran ternyata memerlukan modal sosial berupa hubungan yang didasarkan pada saling percaya di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, modal sosial merupakan “institusi sosial yang melibatkan jaringan (*network*), norma-norma (*norm*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Modal sosial sudah dimiliki oleh masyarakat Pangandaran terutama yang daerahnya akan dijadikan objek wisata, baik itu berupa jaringan di antara berbagai komunitas budaya, norma-norma yang berkaitan dengan sikap dan nilai kehidupan sunda, serta rasa saling percaya di antara mereka dan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata dengan memanfaatkan tradisi buhun yang masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat yang dipimpin oleh sesepuh adatnya.

Berjalannya kolaborasi di antara berbagai pihak dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya atau kearifan lokal di Pangandaran tersebut tidak lepas dari faktor perilaku komunikasi. Maharani memaparkan bahwa perilaku komunikasi merupakan setiap aktivitas yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh informasi dari berbagai sumber dan untuk menyebarluaskan informasi kepada pihak manapun yang memerlukan (Maharani, 2014). Hal ini penting, karena komunikasi dapat membangun pemahaman yang tentang informasi yang disampaikan.

Pentingnya komunikasi dalam membangun

kolaborasi ini, karena di antara sesama penggiat budaya dan pariwisata, dan juga para sesepuh adat memiliki *frame of reference* dan *field of experience* yang relatif berbeda, yang harus di"satukan" pemahamannya dalam rangka mencapai tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu perubahan, pengetahuan, sikap dan perilaku dari peserta komunikasi itu sendiri. Selain itu, membangun keterampilan, keterbukaan, dan saling menghormati ketika berkomunikasi, dapat mengintegrasikan para peserta komunikasi itu sendiri, sehingga terbangun kolaborasi di antara mereka (Rokhmah & Anggorowati, 2017).

Dengan demikian, interaksi di antara pemangku kepentingan seperti kelompok budaya dan kelompok penggiat wisata lainnya menjadi dasar membangun jaringan sosial dalam upaya mengembangkan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran. Dikatakan: "Bentuk interaksi tersebut dapat ditingkatkan menjadi interaksi yang mengarah pada kerja sama melalui komunikasi lebih intensif yang difasilitasi oleh pengelola kawasan" (Rachmawati et al., 2011).

Kerja sama di antara pemangku kepentingan tersebut bisa terbangun dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Kepentingan penggiat budaya adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal yang unik yang harus disosialisasikan kepada khalayak, kepentingan, penggiat pariwisata adalah mengembangkan dan memasarkan objek wisata, perjalanan wisata, memandu wisata, memfasilitasi hunian bagi wisata, dan menyediakan makanan/minuman, dan souvenir bagi wisatawan, dan sebagainya. Ternyata, relasi sosial di antara pemangku kepentingan sangat kondusif, karena kepentingan masing-masing pihak telah terakomodir melalui keseimbangan yang dijalin oleh nilai dan norma-norma sosial yang berlaku.

Keseimbangan yang terbangun berkat kesepahaman mereka tentang nilai-nilai dan norma sosial dalam pengembangan wisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran bisa dipahami, karena pada dasarnya mereka diikat oleh kepentingan yang sama yang merupakan keputusan kolektif di antara pemangku kepentingan, yaitu mengembangkan objek wisata yang lama, membangun objek wisata yang baru, dan mempromosikan semua objek wisata tersebut kepada wisatawan/pengunjung dengan

menyajikan keunikan-keunikan budaya di Kabupaten Pangandaran.

Tercapainya keseimbangan yang didasarkan pada pengakomodasian berbagai kepentingan melalui tindakan kolaboratif tersebut bisa terjadi karena di antara aktor-aktor yang terlibat memiliki kedekatan hubungan, disertai dengan tindakan komunikasi yang efektif dengan mengesampingkan ego sektoral, dan dilandasi oleh rasa saling percaya untuk mencapai tujuan bersama berupa pengembangan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Healey bahwa yang diperlukan dalam kolaborasi antara lain modal yang strategis, yaitu modal sosial berupa kepercayaan, komunikasi, dan kemauan bertukar pikiran, dan modal intelektual yang terdiri dari pemahaman (Fairuza, 2017).

Saluran komunikasi yang mendukung terbentuknya kawasan *geopark* Pangandaran. Pengembangan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran melibatkan berbagai elemen yang menjadi pemangku kepentingannya. Mereka terlibat secara proaktif dalam mengembangkan dan mempromosikan objek wisata berbasis kearifan lokal yang unik. Dalam pengembangan wisata tersebut, para pemangku kepentingan terutama dari penggiat budaya, dan pariwisata menjalin relasi sosial melalui tindakan komunikasi, baik dengan memanfaatkan saluran komunikasi antarpersona, kelompok, maupun bermedia.

Pemanfaatan saluran komunikasi antarpersonal, kelompok, dan bermedia yang sesuai "memudahkan proses komunikasi dan menjadikan komunikasi lebih efektif" (Mingkid, 2015). Sedangkan menurut Harjana, "Komunikasi menjadi efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima dan dimengerti, dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh penerima pesan dengan tanpa memperoleh hambatan dalam aksinya tersebut" (Rokhmah & Anggorowati, 2017).

Efektivitas komunikasi dapat dilihat dari perubahan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi para pemangku kepentingan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dalam pengembangan wisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran. Saluran komunikasi yang digunakan oleh dinas terkait khusus untuk mendukung terbentuknya *geopark* Pangandaran belum terbentuk secara formal, karena sejak diwacanakan oleh bupati

sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Jadi mereka menunggu instruksi selanjutnya, sedangkan saluran komunikasi yang digunakan oleh komunitas budaya dan pariwisata menggunakan saluran media berupa WhatsApp, Facebook, dan Messenger, saluran interpersonal seperti silaturahmi kepada sesepuh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya, dan saluran kelompok seperti pertemuan kelompok komunitas budaya, ritual adat bersama, kelompok penggiat pariwisata, dan sebagainya.

Saluran komunikasi antarpersona yang menurut mereka disebut *person to person*. Saluran komunikasi yang terjadi di level pemerintahan tidak aktif, sedangkan saluran komunikasi yang terbangun di para penggiat budaya dan pariwisata sangat intensif dilakukan, baik antarpersona, kelompok maupun bermedia. Seperti sudah di jelaskan sebelumnya, komunikasi antarpersona (*person to person*) terjadi ketika seorang tokoh penggiat budaya dan pariwisata melakukan silaturahmi kepada sesepuh/ketua adat.

Dialog yang terjadi bersifat informal, santai, membahas makna ritual adat yang masih dilaksanakan, dan kemungkinan ritual tersebut dijadikan daya tarik dalam pengembangan destinasi wisata di wilayah adat tersebut dilaksanakan. Komunikasi antarpersona ini menurut Graham, “sebagai tempat membangun pemahaman dan identitas juga menjadi tempat untuk mengikat masyarakat dalam dialog tentang tujuan, perhatian, dan pengetahuan untuk mencapai kesepakatan dan pembuatan keputusan” (Depoe, 2004). Saluran komunikasi antarpersona ini yang dilakukan dengan efektif dapat membangun kedekatan emosional, memudahkan penerimaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan dari pesan yang disampaikan (Yodiq, 2016).

Komunikasi antarpersona yang terjadi di antara sesepuh adat dengan penggiat budaya dan pariwisata ini dapat memperkuat relasi dan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya atau kearifan lokal di wilayah tersebut. Oleh karena itu menurut Miller:

Memahami hubungan simbiotis antara komunikasi dengan perkembangan relasional merupakan tuntutan dalam memahami proses dari komunikasi interpersonal, karena secara serentak

(bergilir), sifat komunikasi di antara peserta yang terlibat dalam hubungan tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan relasional (Rakhmat, 2008).

Para penggiat budaya dan pariwisata selain melaksanakan silaturahmi dengan sesepuh adat, juga melaku diskusi dengan sesama penggiat dalam suatu forum pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok ini membahas potensi daerah di mana penggiat budaya dan pariwisata tersebut berdomisili. Hampir setiap daerah di wilayah Pangandaran memiliki objek baik berupa alam maupun kearifan lokal yang bisa diangkat untuk destinasi wisata.

Melalui diskusi kelompok tersebut dibahas, baik permasalahan, kendala, maupun solusinya supaya potensi tersebut bisa diwujudkan menjadi objek wisata. Diskusi di antara penggiat budaya dan pariwisata ini merupakan aktivitas komunikasi kelompok, yang menurut Burgoon bertujuan untuk berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, sehingga di antara para pesertanya satu sama lain dapat saling mengingat karakteristik pribadi masing-masing dengan cepat sebagai wujud dari interaksi secara tatap muka yang dilakukannya (Wiryanto, 2005).

Para penggiat budaya dan pariwisata yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal di Pangandaran merupakan sekelompok orang yang memiliki komitmen terhadap persoalan budaya, pariwisata, dan lingkungan. Sebagai anggota kelompok, mereka membangun kebersamaan dan kesepahaman, dan konsensus, yang pada akhirnya melahirkan identitas kelompoknya sebagai sekelompok penggiat budaya dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan pengamatan Bormann bahwa “identitas kelompok dapat dipertahankan apabila di antara anggota yang terlibat kelompok tersebut memiliki perasaan yang sama, dan kesamaan perasaan tersebut merupakan bentuk investasi sosial” (West & Turner, 2009).

Pengaruh kelompok ini cukup besar bagi anggotanya, karena apa yang dipahami dan dilakukan tentang potensi wisata di suatu daerah oleh orang-orang dalam kelompok tersebut, ada kecenderungan orang-orang lain dalam kelompok tersebut akan melakukan hal yang sama. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme penggiat budaya dan pariwisata dalam

kelompok yang telah membangun objek wisata di suatu tempat, seperti objek wisata Santirah, maka penggiat budaya dan pariwisata yang lain mengikuti hal yang sama membangun objek wisata Sutrareregan. Dengan demikian pengaruh kelompok tersebut cukup efektif dalam membangun konformitas di wilayah tersebut.

Konformitas sendiri menurut Kiesler dan Kiesler merupakan “perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan kelompok – yang real atau yang dibayangkan” (Rakhmat, 2008). Tentu saja terjadinya konformitas dalam kelompok penggiat budaya dan pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Pangandaran tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui interaksi yang intensif di antara mereka dengan memperhatikan berbagai faktor situasi dan kondisi wilayah yang akan dijadikan objek wisata, dan faktor personal yang terlibat di dalamnya. Menurut Rakhmat:

Interaksi antara faktor-faktor situasional dan faktor-faktor personal menghasilkan konformitas, di mana kejelasan situasi, konteks situasi, cara penyampaian penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok merupakan faktor-faktor situasional yang menentukan konformitas tersebut (Rakhmat, 2008).

Kecenderungan anggota kelompok penggiat wisata budaya dan wisata untuk bekerja sama, bersepakat, dan berkomitmen untuk mengembangkan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal telah membentuk identitas kelompok yang kuat dan solid, atau dengan kata lain kelompok ini memiliki tingkat kohesivitas yang tinggi. Oleh karena itu, menurut Bettinghouse, “komunikasi dengan kelompok kohesif harus memperhitungkan distribusi komunikasi di antara anggota-anggota kelompok. Anggota biasanya bersedia berdiskusi dengan bebas sehingga saling pengertian akan mudah diperoleh. Saling pengertian membantu tercapainya perubahan sikap” (Rakhmat, 2008).

Selain memanfaatkan saluran antarpersona, dan kelompok, penggiat budaya dan wisata juga menggunakan media sosial dalam pengembangan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal tersebut. Mereka

menggunakan media sosial berbasis internet yang untuk menyampaikan dan menerima pesan melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang tersedia di HP atau di laptopnya. Media sosial ini cukup efektif, efisien, dan terjangkau, serta mudah mengoperasionalkannya dan mudah dibawa ke berbagai lokasi objek wisata. Dengan media sosial tersebut, penggiat budaya dan pariwisata bisa berinteraksi secara pribadi di dunia maya, berbagi informasi program, mengirim dan menerima saran, kritikan dengan leluasa. Hal ini bisa terjadi, karena itu menurut Van Dijk (Nasrullah, 2015) “media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.

Pemanfaatan media sosial, selain karena lebih simpel dan fleksibel, serta mudah di bawa ke mana saja, juga dalam penyimpanan, penerimaan, dan pengiriman pesan sangat efektif dalam pengembangan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal di Pangandaran. Selain itu, informasi yang disampaikan dan diterima oleh peserta komunikasi tersebut selalu aktual. Di samping itu juga, media sosial (HP) dapat menjadi media transmisi seketika yang dapat dibawa ke mana-mana, dikatakan “menjadi multi media yang dapat menyediakan segala macam kebutuhan, baik sebagai media penyimpanan, *media processing*, maupun sebagai media penyiaran yang dapat secara *real time* berfungsi sebagai media transmisi” (Bungin, 2007).

Pengembangan pariwisata *geopark* berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran masih belum jelas, bukan disebabkan oleh faktor alam dan keanekaragaman budayanya, melainkan lebih kepada masalah kebijakan pemerintah daerah yang kurang responsif. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran lebih memprioritaskan objek wisata yang sudah ada dengan menata infrastruktur menjadi lebih baik demi kenyamanan wisatawan. Namun demikian, bukan berarti rencana pengembangan wisata *geopark* dihentikan, mungkin masih menunggu moment yang tepat. Padahal dukungan sumber daya alam dan budaya, serta sumber daya manusia untuk mendukung ke arah pengembangan pariwisata tersebut cukup besar.

Khususnya dukungan sumber daya manusia sebagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari



aktivitas para penggiat budaya dan pariwisata, seperti kompepar, paguyuban pemandu wisata, pengusaha Travel, pengusaha hotel dan restoran telah bergerak cepat.

Kiprah mereka sangat tinggi dalam mengembangkan objek wisata dan meningkatkan kedatangan pengunjung ke Kabupaten Pangandaran, sehingga keberadaan para pemangku kepentingan ini sangat penting, karena bisa menjadi mitra bagi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata dan Budaya. Oleh karena itu, “keberadaan pemangku kepentingan menyebabkan adanya tuntutan untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan, penentuan kebijakan pengembangan hingga pada pengelolaan daya tarik wisata ataupun usaha pariwisata” (Darwis & Junaid, 2016).

## SIMPULAN

Potensi pariwisata di Pangandaran tidak hanya wisata pantai, tetapi juga wisata budaya, karena di wilayah tersebut banyak bertebaran situs-situs peninggalan zaman sunda buhun, baik berupa makam-makam keramat maupun petilasan-petilasan para tokoh zaman dulu, serta berbagai ritual warisan sesepuh jaman dahulu. Tradisi budaya lokal, seperti, *layang Syeikh, babarit, hajat leuweung*, dan sebagainya telah dimanfaatkan untuk menambah daya tarik wisata di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran.

Pola interaksi pada tataran birokrat masih belum jelas, karena rencana tersebut baru sebatas wacana atau statement politis, sedangkan pada tataran masyarakat (penggiat budaya dan pariwisata) sudah terbentuk melalui forum silaturahmi dengan sesepuh adat, dan diskusi kelompok penggiat budaya dan wisata, sehingga terbangun kesepahaman, kesepakatan, kerjasama, dan kolaborasi di antara mereka.

Saluran komunikasi yang terbentuk dalam pengembangan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal bersifat *person to person* (antarpersona) antara penggiat budaya dan pariwisata dengan sesepuh adat yang didasarkan pada keterbukaan, kesamaan, dan empati di antara kedua belah pihak, sehingga melahirkan kesepakatan dan kerja sama untuk memanfaatkan aktivitas budaya dijadikan daya tarik wisata. Sedangkan saluran kelompok yang terbangun pada komunitas penggiat budaya dan

pariwisata tersebut memiliki konformitas dan kohesivitas yang tinggi dalam mengembangkan destinasi wisata *geopark* berbasis budaya dan kearifan lokal di Pangandaran. Sementara media sosial (HP) berbasis Internet telah membantu mereka untuk berbagi informasi program, mengirim dan menerima saran serta kritikan dengan leluasa, sehingga semakin menguatkan hubungan dan ikatan sosial di antara mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, E. S. Y. (2014). Pengaruh atribut produk wisata terhadap place branding dan implikasinya terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata pantai. *Jurnal Ilmiah Solusi*, 1(1), pp.87–94.
- Andung, P. A. (2010). Perspektif komunikasi ritual mengenai pemanfaatan natori sebagai media komunikasi tradisional dalam masyarakat adat Boti dalam di kabupaten Timor Tengah Selatan, propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), pp.1–10.
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, L. (2016). Pemaknaan pesan pada upacara ritual tabot (studi pada simbol-simbol kebudayaan Tabot di provinsi Bengkulu). *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 3(1), pp.16–24.
- Basrowi & Sukidin. (2002). *Metode penelitian perspektif mikro: grounded theory, fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dramaturgi, interaksi simbolik, hermeneutik, kontruksi sosial, analisis wacana, dan metodologi refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. (2004). *Pengantar ilmu komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Darwis & Junaid, I. (2016). Kemitraan sebagai strategi pengembangan pariwisata dan industri hospitality. *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), pp.1–13.
- Depoe, S. P. (2004). *Communication and public participation in environmental decision making*. New York: State University of New York Press.
- Fairuza, M. (2017). Pembangunan inklusif pada

- sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), pp.1–13.
- Idum, V., Linggi, R. K. & Hatuwe, M. (2017). Peran kepala adat dalam melestarikan kesenian daerah di desa batu majang kecamatan long bagun kabupaten mahakam ulu. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), pp.1765–1778.
- Lattimore, D., Heiman, B. O. & Toth, E. L. (2010). *Public relations: profesi dan praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maharani, D. (2014). Makna pariwisata Pulau Kemaro menurut pengunjung dan perilaku komunikasinya. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(1), pp.73–84.
- Mingkid, E. (2015). Penggunaan media komunikasi promosi pariwisata oleh pemerintah Kota Manado. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(3), pp.188–192.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Nawangsih. (2017). Nilai kearifan lokal kawasan wisata menggunakan pendekatan green marketing berbasis masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 7(1), pp.57–65.
- Nugraha, A. R., Perbawasari, S., & Zubair, F. (2017). Model komunikasi pariwisata yang berbasiskan kearifan lokal. *Jurnal The Messenger*, 9(2), pp.231–240.
- Permana, C. E. R. (2010). *Kearifan lokal masyarakat baduy dalam mitigasi bencana*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Priyanto & Safitri, D. (2016). Pengembangan potensi desa wisata berbasis budaya tinjauan terhadap desa wisata di jawa tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1), pp.76–84.
- Rachmawati, E., Muntasib, H. & Sunkar, A. (2011). Interaksi sosial masyarakat dalam pengembangan wisata alam di kawasan Gunung Salak Endah. *Jurnal Forum Pascasarjana*, 34(1), pp.23–32.
- Rakhmat, J. (2008). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rakib, M. (2017). Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai penunjang daya tarik wisata. *Jurnal Kepariwisataaan*. 1(2), pp.54–69.
- Rokhmah, N. A. & Anggorowati (2017). Komunikasi efektif dalam kolaborasi interprofesi sebagai uaya meningkatkan kualitas pelayanan. *Journal of Health Studies*, 1(1), pp.65–71.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sutarso, J. (2012). Menggagas pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. in menggagas pencitraan berbasis kearifan lokal. Purwokerto: Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed, pp. 505–515.
- West, R. & Turner, L. H. (2009). Teori komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wibawanto, S. (2015). Pendekatan konseptual place marketing dan place branding dalam destination branding. *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(2).
- Wiryanto. (2005). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Yodiq, M. (2016). Peran komunikasi interpersonal kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di sekolah menengah atas islam samarinda. *ejournal Ilmu Komunikasi*, 4(2), pp.24–35.